

Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Maharani Aulia R¹, Yulhendri²

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
maharaniauliar@gmail.com¹, yulhendriunp@gmail.com²

Abstract : *This study aims to determine and analyze: 1) The influence of the education budget on the gross enrollment rate of junior high school education, 2) The effect of the number of teachers on the gross enrollment rate of junior secondary school education, 3) the effect of the number of classes on the gross enrollment rate of school education junior secondary in regencies / cities in West Sumatra Province. This research is classified into descriptive and associative research. The data analysis technique used in this study in proving and testing the proposed hypothesis is a panel data regression model. The results of this study found that: 1) There is a negative and insignificant influence between the education budget on the gross enrollment rate of junior secondary education, 2) There is a negative and significant effect between the number of teachers on the gross enrollment rate of junior secondary education, 3) There is positive and significant effect between the number of classes on the junior high school education gross enrollment rate in the district / city of West Sumatra Province.*

Keywords: *education budget, number of teachers, number of classes, rough participation rates*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan adanya pendidikan mampu memberikan pelatihan, pengajaran, pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang mana nantinya akan menghasilkan pribadi yang mandiri dan produktif. Di Indonesia arti penting pendidikan tergambar dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Hal ini dipertegas dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang berisikan pasal-pasal diantaranya membahas pengaturan hak dan kewajiban pemerintah di sektor pendidikan, dimana setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Mulyono, 2016 : 188). Selanjutnya pada UU No. 20 tahun 2003 juga menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Besarnya alokasi anggaran pendidikan yang dikeluarkan dari APBN dan APBD tentunya harus diiringi dengan peningkatan angka partisipasi pendidikan sekolah terutama pada tingkat pendidikan dasar di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi pendidikan.

Indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat kesuksesan usaha pemerintah dalam sektor pendidikan yaitu dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut BPS Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional. Pada tahun 2015-2019 target APK Nasional usia 13–15 tahun sebesar 106.9 persen. Namun kenyataannya partisipasi Sekolah Menengah Pertama belum semua provinsi bisa terpenuhi. Masih banyak Kabupaten/Kota di provinsi yang rata-rata partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertamanya masih dibawah target nasional, dimana nilai rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013- 2017 masih dibawah 100 persen.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Persen (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Kepulauan Mentawai	89,11	86,80	99,76	96,50	85,44
2	Kab. Pesisir Selatan	81,62	75,41	91,46	96,44	88,81
3	Kab. Solok	88,25	74,40	89,43	98,80	90,19
4	Kab. Sijunjung	80,48	88,15	83,75	85,41	83,47
5	Kab. Tanah Datar	79,44	90,73	88,43	88,84	95,48
6	Kab. Padang Pariaman	83,25	89,56	85,44	90,34	84,08
7	Kab. Agam	83,89	80,61	95,57	97,86	95,03
8	Kab. Lima Puluh Kota	83,63	90,22	91,57	82,47	87,13
9	Kab. Pasaman	90,48	94,43	85,40	87,45	87,20
10	Kab. Solok Selatan	70,93	80,99	94,21	91,87	81,84
11	Kab. Dharmasraya	81,52	83,42	90,93	82,17	81,36
12	Kab. Pasaman Barat	96,07	98,35	87,10	90,36	89
13	Kota Padang	85,79	95,96	90,52	93,81	102,43
14	Kota Solok	85,82	89,13	110,43	78,44	81,03
15	Kota Sawah Lunto	81,71	93,66	86,46	98,09	95,22
16	Kota Padang Panjang	91,71	94,32	99,23	88,58	86,95
17	Kota Bukittinggi	87,90	86,58	111,95	84,51	87,71
18	Kota Payakumbuh	104,16	100,13	97,03	86,69	85,63
19	Kota Pariaman	85,51	88,05	103,11	78,99	86,25
	Rata-rata	85,86	88,47	93,78	89,35	88,12

Sumber: BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat nilai rata-rata APK SMP pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2013 nilai rata-rata APK SMP sebesar 85,86 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 88,47 persen. Pada tahun 2015 rata-rata APK mengalami

peningkatan dimana nilainya sebesar 93,78 persen tetapi mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 89,35 persen dan tahun 2017 mencapai 88,12 persen.

Belum tercapainya target tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dapat membuktikan bahwa akses penduduk dalam mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan SMP masih minim. Hal ini tentunya di sebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor yang dapat mempengaruhi berupa faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan yang dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan yaitu pendapatan perkapita, tingkat melek huruf usia dewasa, jumlah sekolah dan tingkat urbanisasi penduduk, sedangkan untuk faktor penawaran yaitu rasio guru terhadap murid, biaya pendidikan, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (Dreher, et al 2006). Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (anggaran pendidikan), jumlah guru dan jumlah sekolah (jumlah kelas).

Anggaran pendidikan merupakan salah satu hal yang berperan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Faguet dan Sanchez (2008) mengungkapkan bahwa jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi Kasar. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja pemerintah yang dikeluarkan dalam sektor pendidikan atau anggaran pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat pendidikan pada daerah tersebut. Anggaran pendidikan merupakan biaya atau dana yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya yang dikeluarkan berupa pengadaan pembangunan sekolah, pembelian stationary, uang sekolah, serta biaya-biaya penunjang pelaksanaan proses pendidikan, (Todaro, 2000).

Data anggaran pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017 yang dilihat dari rata-rata anggaran pendidikan per penduduk usia sekolah mengalami naik turun, dimana pada tahun 2013 rata-rata anggaran pendidikan per siswa adalah sebesar Rp 5.435.385 per siswa, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 6.178.544 per siswa. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 5.944.028 persiswa, dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 8.836,865 per siswa. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 6.756.104 per siswa.

Pergerakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang tidak merata akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi indonesia dimana masih rendahnya mutu pendidikan. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan produktif, tidak hanya anggaran pendidikan saja yang diperlukan, tetapi juga dibutuhkan seorang guru/tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan siswa (Saidah, 2016: 219). Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiharna (2007), yang menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan tidak hanya terdiri dari bangunan dan seperangkat sarana fisik saja yang diperlukan, melainkan ada hal yang sangat penting yang diperlukan dalam lembaga pendidikan yaitu berupa tenaga

kependidikan, khususnya tenaga guru. Dengan adanya tenaga guru maka akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data jumlah guru yang penulis dapatkan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 rata-rata jumlah guru pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah 1.234 jiwa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.303 jiwa. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang mana rata-rata jumlah guru menjadi 938 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 942 jiwa dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 927 jiwa.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat APK jenjang pendidikan SMP adalah jumlah kelas yang ada pada daerah masing-masing. Pencapaian di bidang pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang terdapat di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan yang tersedia akan semakin menunjukkan terbukanya kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, (Zaada, 2018). Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah ruang kelas maupun fasilitas sekolah yang ada di SMP maka semakin banyak peluang masyarakat di daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dari data yang penulis kumpulkan dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kelas yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 rata-rata jumlah kelas sebesar 374 unit, tahun 2014 meningkat menjadi 398 unit, selanjutnya tahun 2015 menjadi 436 unit, pada tahun 2016 sebesar 460 unit dan pada tahun 2017 rata-rata jumlah kelas yang ada menjadi 465 unit.

Berdasarkan pada uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui : 1) Pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SMP. 2) Pengaruh jumlah guru terhadap angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SMP. 3) Pengaruh jumlah kelas terhadap angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka, yang bertujuan untuk menjelaskan variabel atau kondisi yang terjadi dalam suatu situasi. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh dan tingkat signifikan antara variabel terikat dengan variabel bebas.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu data dikumpulkan dari Lembaga atau instansi pemerintah. Tempat penelitian ini difokuskan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan periode data dari tahun 2013-2017. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data panel dengan menggunakan aplikasi *evIEWS 9*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan untuk membahas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam bentuk analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian model yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM) maka estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan *Common effect Model* (CEM). Berikut hasil pengujian data panel dengan model *Common effect* pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 : Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.2755	32.91635	4.231195	0.0001
LOG(X1)	-1.267398	1.724162	-0.735080	0.4642
LOG(X2)	-5.299196	2.189125	-2.420691	0.0175
X3	0.012623	0.005830	2.165268	0.0330
R-squared	0.060569	Mean dependent var		89.11389
Adjusted R-squared	0.029599	S.D. dependent var		7.237597
S.E. of regression	7.129680	Akaike info criterion		6.807603
Sum squared resid	4625.743	Schwarz criterion		6.915135
Log likelihood	-319.3611	Hannan-Quinn criter.		6.851054
F-statistic	1.955720	Durbin-Watson stat		1.930979
Prob(F-statistic)	0.126236			

Sumber: Hasil regresi panel dalam program Eviews 9 (data di olah tahun 2019)

Dari tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = 139.2755 - 1.267398 \text{Log}X_{1it} - 5.299196 \text{Log}X_{2it} + 0.012623X_{3it}$$

Sesuai tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan pada anggaran pendidikan, jumlah guru dan jumlah kelas maka partisipasi pendidikan SMP mengalami peningkatan sebesar 139.2755. persamaan tersebut menggambarkan koefisien variabel anggaran pendidikan sebesar -1.267398, apabila terjadi peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1 persen maka partisipasi pendidikan SMP akan mengalami penurunan sebesar 1.267 persen. Koefisien variabel jumlah guru sebesar -5.299196, apabila terjadi peningkatan jumlah guru sebesar 1 persen maka partisipasi pendidikan SMP akan mengalami penurunan sebesar 5.299. selain itu koefisien variabel jumlah kelas sebesar 0.012623, apabila terjadi peningkatan jumlah kelas sebesar 1 persen, maka partisipasi pendidikan SMP akan mengalami peningkatan sebesar 0.012 persen pada Kabupaten/Kota provinsi Sumatera barat.

Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis data setelah dilakukan uji asumsi klasik, ditemukan bahwa model yang digunakan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Pada uji normalitas data, nilai probability sebesar 0.154798 atau bernilai lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Selanjutnya pada uji autokorelasi diketahui bahwa nilai durbin-watson stat 1,930979 dengan membandingkan dengan tabel DW maka didapatkan hasil sebagai nilai durbin-watson > dari nilai DU (1,73) dan lebih < dari 4-DU (2,26) maka data tidak ada masalah autokorelasi. Uji multikolonieritas diketahui bahwa variabel < 0,9 maka data dikatakan terbebas dari masalah

multikolonieritas dan pada uji heterokedastisitas diketahui bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel tersebut tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi R^2 dilakukan untuk mengetahui persentase variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian maka diketahui nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,060569. Hal ini mengartikan bahwa variabel jumlah anggaran pendidikan, jumlah guru dan jumlah kelas memberikan kontribusi sebesar 6,0 persen dalam mempengaruhi Partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 94,0 persen lainnya ditentukan oleh variabel-variabel lain yang terdapat diluar model dan tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Uji T

Anggaran pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4642 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha 5% sehingga ($0,4642 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran pendidikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada variabel jumlah guru nilai probabilitasnya sebesar 0.0175, nilai tersebut kecil dari nilai alphanya ($0,0175 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa jumlah guru berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada jumlah kelas diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0330 yang berarti ($0,0330 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima, jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kelas terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Partisipasi Pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan program Eviews versi 9 maka diketahui bahwa anggaran pendidikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat memiliki pengaruh negatif dengan koefisien regresinya sebesar -1.267398 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4642 yang lebih besar dari taraf signifikannya $\alpha = 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara anggaran pendidikan (X_1) terhadap partisipasi pendidikan SMP (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya perubahan yang terjadi pada anggaran sektor pendidikan tidak akan mengakibatkan perubahan pada Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Menurut teori Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa, pada sisi penawaran (oleh negara), pendidikan dibatasi dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Adapun permintaan untuk mendapatkan pendidikan itu merupakan permintaan tidak langsung yang mana nantinya permintaan tersebut akan memberikan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi pada sektor modern. Selanjutnya

Todaro dan Smith juga mengatakan bahwa permintaan tersebut juga ditentukan oleh kombinasi empat variabel, antara lain (1) selisih, perbedaan upah atau perbedaan pendapatan antara sektor modern dan sektor tradisional; (2) memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan; (3) biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya; dan (4) biaya tidak langsung atau biaya oportunitas pendidikan. Selain dari kombinasi empat variabel di atas, masih terdapat beberapa variabel penting lain yang bersifat non ekonomi, seperti pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga dimana hal tersebut dapat memengaruhi tingkat permintaan terhadap pendidikan (Glewwe, 2002).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachry (2018) yang menyatakan bahwa dana pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, dimana perubahan dana pendidikan tidak akan mempengaruhi angka partisipasi pendidikan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Jasmina (2016) yang menganalisis dampak dari pengeluaran pemerintah pada rasio partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah di tingkat kabupaten. Mereka menemukan bahwa kombinasi dari pengeluaran pemerintah baik pusat dan daerah pada pendidikan tidak memiliki dampak signifikan pada perubahan rasio partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah. Penelitian dari Arunatilake (2006) juga mendukung hal tersebut dimana walaupun pemerintah telah memberikan beberapa langkah kesejahteraan untuk memberikan bantuan keuangan kepada anak usia sekolah seperti penyediaan bebas buku, seragam, tarif bus bersubsidi dan makanan tengah hari, namun kemiskinan masih menjadi faktor penyebab menurunnya kehadiran anak usia sekolah di setiap sekolah untuk orang miskin atau kurang mampu. Hal ini terjadi karena masih adanya biaya langsung atau tidak langsung dari sekolah, serta manfaat yang masih rendah dari sekolah dimana masih buruknya kualitas pendidikan.

Sedangkan dalam penelitian Jolianis (2015) mengatakan bahwa anggaran sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Faguet dan Sanchez (2008) yang mengatakan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap *outcomes* bidang pendidikan yang dilihat dari tingkat partisipasi sekolah. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar belanja pemerintah yang dikeluarkan dalam sektor pendidikan atau anggaran pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi pendidikan pada daerah tersebut.

Pengaruh Jumlah Guru Terhadap Partisipasi Pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah guru memiliki nilai koefisien regresinya sebesar -5.299196 dan probabilitas sebesar 0.0175 dimana nilainya kecil dari taraf signifikannya $\alpha (0,05)$ yaitu $0.0175 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara jumlah guru (X_2) terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Y). Hal ini mengartikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah guru berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, dimana setiap

jumlah guru meningkat sebesar satu persen, maka partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat akan menurun sebesar 5.299196 persen.

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam penunjang proses pendidikan karena guru yang menjadi proyektor pengendalian dalam ruang kelas yang ada di sekolah baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Semakin tinggi jumlah guru maka akan semakin banyak rombongan belajar yang akan diterima saat pendaftaran siswa baru, sehingga hal ini akan menjadi pemicu dalam peningkatan partisipasi pendidikan, karena bertambahnya murid baru yang diterima yang mana nantinya akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Namun tidak selamanya jumlah guru yang meningkat akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Jumlah guru yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan keahlian maupun kualitas seorang guru dalam proses belajar mengajar maka hal itu tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pendidikan, karena dalam pendidikan sangat diperlukan guru-guru yang profesional dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, terampil dan berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Purwanto (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rasio guru murid berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat satu persen untuk semua tingkat sekolah. Seperti yang diharapkan, hasilnya menegaskan bahwa rasio guru murid yang lebih kecil akan meningkatkan hasil pendidikan. Namun, jumlah guru yang memadai terhadap sejumlah siswa bukan lagi tentang banyaknya guru yang dapat menampung setiap rombongan belajar, melainkan bergeser kepada distribusi guru spasial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solechah (2010) menunjukkan hasil sebaliknya dimana dari hasil uji tersebut menyatakan bahwa rasio murid dan guru berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah.

Pengaruh Jumlah Kelas Terhadap Partisipasi Pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah kelas memiliki nilai koefisien regresinya sebesar 0.012623 dan probabilitas sebesar 0.0330 dimana nilainya kecil dari taraf signifikannya α (0,05) yaitu $0.0330 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah kelas (X_3) terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Y). Hal ini mengartikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, dimana setiap jumlah kelas meningkat sebesar satu persen, maka partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0.012623 persen.

Ruang kelas digunakan untuk menampung peserta didik sebanyak kapasitas ruang kelas tersebut. Apabila jumlah penawaran peserta didik terus meningkat maka hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang di perlukan. Jika semakin meningkat jumlah ruangan kelas maka akan semakin banyak rombongan belajar atau peserta didik yang akan diterima saat pendaftaran siswa baru, sehingga akan terjadi peningkatan

partisipasi pendidikan, karena bertambahnya murid baru yang diterima nantinya akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata lain pemerataan akses pendidikan dengan cara meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai akan membantu meningkatkan partisipasi pendidikan dimana hasilnya nanti akan membuat masyarakat memiliki kecakapan hidup sehingga dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia. (Nurani, 2017). Penelitian ini didukung dengan penelitian Neilson dan Zimmerman (2014) yang menyatakan bahwa diadakannya pembangunan sekolah pada daerah perkotaan yang masih dominan terdapat penduduk miskin akan dapat memicu peningkatan angka pendaftaran siswa, dimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut menjadi kendala dalam peningkatan partisipasi pendidikan yang jika di dilihat dari tingkat kemiskinannya. Sehingga dengan adanya upaya dalam penyediaan akses terhadap pendidikan dengan cara menyediakan sekolah terdekat dapat memicu partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmatin (2017) yang menyatakan bahwa jumlah sekolah berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, namun terdapat pengaruh yang negatif, dimana jika terjadi peningkatan jumlah sekolah maka Angka Partisipasi Sekolah (APS) akan menurun.

SIMPULAN

Peneliti mengolah data dengan menggunakan analisis regresi panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anggaran pendidikan, jumlah guru dan jumlah kelas terhadap variabel terikatnya yaitu partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pengolahan data tersebut dapat diperoleh kesimpulan dimana anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah Guru di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan koefisien regresinya sebesar -5.299196. Artinya untuk setiap peningkatan jumlah guru sebesar satu persen akan menurunkan partisipasi pendidikan SMP sebesar 5.299196 persen. Jumlah kelas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya jika terjadi peningkatan jumlah kelas maka akan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pendidikan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil penelitian serta dari kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran dalam penelitian ini dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 3 variabel bebas yang dianggap berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan SMP, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan SMP di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disarankan untuk pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat agar dapat

lebih meningkatkan partisipasi pendidikan dengan cara memberikan fasilitas pendidikan secara merata disetiap daerah serta diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan semakin membaik dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arunatilake, Nisha. (2006). "Education Participation in Sri Lanka-Why All are Not in School". *International Journal of Educational Research*, 137-152.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2014*. Padang: BPS.
- _____. *Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2015*. Padang: BPS.
- _____. *Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2016*. Padang: BPS.
- _____. *Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2017*. Padang: BPS.
- _____. *Sumatera Barat dalam Angka, Susenas2018*. Padang: BPS.
- Fachry, M. Elfarabi. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia*. Artikel Universitas Islam Indonesia.
- Faguet, J. P and Sanchez, F. (2008). "Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia". *World Development*, Vol. 36, No. 7, pp. 1294-1316.
- Glewwe, Paul. (2002). "Schools and Skills in Developing Countries: Education Policies and Socioeconomic Outcome". *Journal of Economic Literature*, 436-482.
- Jasmina, Thia. (2016). "Public Spending and Learning Outcomes of Basic Education at the District Level in Indonesia". *Journal of Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 62, No. 3, 180–190.
- Jolianis. (2015). *Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, Vol.3 No.2 (169-184)
- Mulyono. (2016). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Neilson, C.A and Zimmerman, S, D. (2014). "The Effect of School Construction on Test Scores, School Enrollment, and Home Prices". *Journal of Public Economics*, 120, 18-31.
- Nurani, Devi. (2017). *Analisis Kebutuhan Ruang Kelas SD Berdasarkan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah di Kota Cirebon*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 24, No. 1.
- Purwanto, Daniey Adi. (2010). "Decentralization and Its Impact on Primary Education Outcomes". *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 25, No. 1, 41-58.
- Rahmatin, Ummy Zulfa dan Soejoto, Adi. (2017). *Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan*, Vol. 01, No. 01, Hal. 127-140.
- Solechah. (2010). "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah".
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wiharna, Ono. (2007). *Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Kewilayahan*. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta.
- Zaada, Melati Rizki. (2018). *Analisis Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/Sederajat Dengan Angka Partisipasi Kasar Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017*. Artikel Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.